

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jepang merupakan negara dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional atau negara dengan kaisar sebagai kepala negara tetapi perdana menteri lah yang menangani urusan administratif negara. Meski demikian, Jepang menerapkan sistem demokrasi dalam pemilihan anggota parlemennya yakni melalui pemilu (pemilihan umum).

Parlemen di Jepang disebut dengan *gikai* (議会) atau lebih dikenal dengan sebutan *diet* yang dibagi menjadi 2 bagian yakni Majelis Rendah¹ dan Majelis tinggi². Saat pemilu diselenggarakan calon-calon *diet* inilah yang nantinya berusaha untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari seluruh kalangan masyarakat tidak terkecuali dari pemilih muda.

Pada setiap pemilu, pemilih muda dapat dikatakan merupakan calon pemilih yang potensial. Pengalaman pemilih muda mengenai politik pun tidak sebanyak yang dimiliki pemilih yang telah berusia tua. Wolfinger dan Rosenstone dalam Blais menyatakan bahwa “...*they (young voters) have been less exposed to politic,*” (Blais, 2000:26) yang kurang lebih dapat diartikan bahwa pemilih muda tidak terlalu terpapar dengan politik sehingga pemilih muda memiliki peluang

¹ Majelis Rendah : disebut juga *shugi-in (House of Representative)* setingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tugas majelis rendah adalah menyalurkan aspirasi masyarakat.

² Majelis Tinggi : disebut juga *sangi-in (House of Councilors)*. Majelis tinggi bertugas mengecek dan memperhitungkan kembali putusan majelis rendah.

lebih besar untuk dipengaruhi agar mau memberinya pada partai tertentu dalam pemilu. Pemilih muda umumnya belum menentukan partai mana yang akan ia beri dukungan, berbeda dengan pemilih berusia tua yang cenderung loyal dengan partai yang telah ia dukung selama ini. Jika calon *diet* di bawah naungan partai tertentu mampu menarik pemuda dalam kubu mereka, dapat dipastikan mereka akan memperoleh suara dengan jumlah yang cukup banyak.

Menurut web resmi Kementerian Hubungan Dalam Negeri dan Komunikasi atau *Shoumushou* (総務省), pemilihan umum untuk memilih Majelis Rendah diadakan 4 tahun sekali dengan jumlah lowongan sebanyak 247 kursi, sedangkan untuk pemilihan Majelis Tinggi diadakan 6 tahun sekali dengan jumlah lowongan sebanyak 242 kursi³. Usia minimal untuk dipilih adalah 30 tahun, untuk batas usia minimal seseorang untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah 20 tahun⁴.

Pada usia kisaran 20 tahun, rata-rata pemuda Jepang berada pada titik dimana mereka tengah menempuh pendidikan tinggi atau sedang menjadi mahasiswa. Seorang mahasiswa secara umum tidak saja dituntut cerdas, mereka juga diharapkan untuk kritis dan dapat membangun negara lebih baik di masa mendatang, salah satunya melalui bidang politik di negaranya.

Hal yang menarik adalah dalam jurnal survei nasional yang diterbitkan Departemen Pemilihan Umum Kementerian Hubungan Dalam Negeri dan

³Pemilu Majelis Rendah dan Majelis tinggi dapat dipercepat tergantung dari kebijakan kabinet yang sedang memerintah. Apabila kinerja Majelis Rendah atau Majelis tinggi dianggap tidak sesuai harapan atau terganjal berbagai skandal, maka dapat dibubarkan dan diadakan pemilu ulang untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut. Passin dalam bukunya (Passin, 1979:5) menjawabkan bahwa rata-rata masa jabatan Majelis Rendah dan Majelis Tinggi berkisar antara 3 tahun.

⁴Usia untuk menggunakan hak pilih atau disebut juga dengan *senkyouken* (選挙権) tercantum dalam dalam Undang-Undang Pemilu Dinas Publik atau *Koushokusenkyouhou* (公職選挙法) atau *Public Office Election Law article 9*. (http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo02.html) (diakses tanggal 27 Oktober 2014, pukul 14.45 WIB)

Komunikasi atau *Soumushou Senkyoubu* (総務省選挙部) di Jepang, pada pemilihan majelis tinggi pada periode ke-19 sekitar tahun 2001 jumlah pemilih usia 20 hingga 24 yang menggunakan suaranya sebesar 32.82%. Sepuluh tahun kemudian, jumlahnya meningkat yakni pada periode ke-22 tahun 2010 menjadi 33.68%. Pada periode ke-23 tahun 2013 terungkap bahwa jumlah pemilih muda yang berada pada kisaran usia 20 hingga 24 tahun yang ikut serta dalam pemilu jumlahnya turun menjadi 31.18%, artinya terjadi penurunan penggunaan hak suara sebesar 2.5% dikalangan pemuda. Meskipun jumlah pemilih mengalami pasang surut, namun jumlah pemilih muda yang menggunakan suaranya masih tergolong sedikit. Jika tahun 2013 terdapat 31.18% pemuda yang menggunakan hak pilihnya berarti masih ada 68.82% pemuda yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Hasil survei di atas menunjukkan jumlah pemilih muda Jepang pada usia dimana mereka sedang menempuh pendidikan tinggi yang berpartisipasi dalam pemilu cenderung sedikit. Sedikitnya jumlah pemilih muda tersebut memiliki banyak dampak salah satunya seperti yang diungkapkan Maeda Masataka dalam artikel berjudul *Election System Dilutes Voice of Young Voters* yang dipublikasikan tahun 2001 oleh *Japan Center of Economic Research* atau JCER⁵ yakni “...young voters have less of an influence on national policies than their older counterparts” (Maeda, 2011:1). Pemilih muda punya dampak yang kurang

⁵ Japan Center of Economic Research (JCER) adalah lembaga penelitian non-profit independen yang berdiri tahun 1963, bergerak tidak hanya dalam bidang ekonomi tapi juga dalam hal-hal yang memiliki hubungan dengan perekonomian yakni bisnis dan pemerintahan (<http://www.jcer.or.jp/eng/about/index.html>, diakses tanggal 26 Desember 2014, pukul 19.26 WIB)

dalam politik nasional daripada kelompok usia lainnya. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti, karena ada pertentangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi. Harapan bahwa pemuda khususnya mahasiswa dapat kritis dan peduli dengan kondisi negaranya (salah satunya adalah dalam bidang politik) ternyata berbanding terbalik, hal terbukti di dalam hasil survei di atas, pada kenyataannya jumlah pemuda yang berpartisipasi justru semakin berkurang. PM Shinzo Abe dalam pidatonya pada Sidang Diet ke-189 yang dikutip dari web resmi Perdana Menteri menyatakan bahwa, *“young people will shape the future of Japan. I hope young people live up to their fullest potential and play active roles in society.”* (Website Prime Minister of Japan and His Cabinet. 2015. *Policy Speech by Prime Minister Shinzo Abe to the 189th Session of the Diet*, (online) http://japan.kantei.go.jp/97_abe/statement/201502/policy.html, diakses tanggal 6 April 2015, pukul 06.42 WIB).

Shinzo Abe berharap agar pemuda juga turut aktif dalam perannya di masyarakat, dalam hal ini termasuk juga peran mereka dalam menyuarakan pendapat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online kata minat memiliki makna “kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu; gairah; keinginan,” (<http://kbbi.web.id/minat>, diakses tanggal 7 April 2015 pukul 12.44 WIB), sedangkan pemilu yang merupakan kependekan dari Pemilihan Umum dalam web www.pemiluindonesia.com memiliki makna “suatu proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, seperti presiden, anggota DPR (parlemen), gubernur, bupati/ walikota, dan kepala desa,”

(<http://www.pemiluindonesia.com/kamus>, diakses tanggal 7 April 2015 pukul 13.06 WIB). Menurut Ali Murtopo dalam Pito dkk (2006:299), "...pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi."

1.2 Batasan Penelitian

Sesuai dengan judul, penelitian ini menggunakan sebagian mahasiswa Shizuoka University of Art and Culture (SUAC) sebagai sampel. "Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi," (Anshori dan Sri Iswati, 2009: 94). Dikarenakan keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, peneliti tidak dapat menjadikan seluruh mahasiswa Shizuoka sebagai sampel.

Faktor pendukung menggunakan mahasiswa SUAC sebagai sampel, yakni yang pertama adalah dikarenakan lokasi SUAC yang cukup dekat dari pusat pemerintahan Jepang yakni di Tokyo. Umumnya daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan memiliki akses yang lebih baik terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan.

Kedua, bidang studi yang diajarkan di SUAC umumnya tidak berhubungan langsung dengan hal-hal yang berbau politik dan pemerintahan sehingga dapat diasumsikan merepresentasikan mahasiswa Jepang pada umumnya. Dalam web resminya, SUAC memiliki 2 fakultas yakni Fakultas Kebijakan Kebudayaan yang meliputi Departemen Kebudayaan Internasional, Departemen Kebijakan Kebudayaan dan Manajemen Regional, dan Departemen Manajemen Seni serta Fakultas Desain meliputi Departemen Desain. (<http://www.suac.ac.jp/english/>

[about/](#), diakses tanggal 21 Juni 2015 pukul 14.34 WIB). Artinya SUAC tidak memiliki mata pelajaran yang mengajarkan politik dan pemerintahan. Mahasiswa yang tidak sedang menempuh pendidikan bidang studi politik dan pemerintahan umumnya tidak familiar dengan hal-hal berhubungan dengan politik, dalam hal ini termasuk juga pemilu. Sementara mahasiswa yang mengambil bidang studi politik dan pemerintahan tentu saja lebih memahami hal-hal yang berhubungan dengan pemilu karena bidang studi mereka mengajarkan hal tersebut secara formal.

Lingkungan SUAC yang dekat dari pusat pemerintahan dan tidak familiar dengan hal-hal yang berhubungan dengan politik sangat menarik untuk dijadikan sampel mewakili sebagian besar mahasiswa-mahasiswa di Jepang yang tidak mengambil bidang studi politik dan pemerintahan. Hal ini menarik karena peneliti dapat mengetahui pandangan mahasiswa yang memang tidak belajar secara formal mengenai politik dalam hal ini mencakup pemilu. Berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas, peneliti memilih judul: *Minat Mahasiswa Jepang Terhadap Pemilu Jepang studi mahasiswa Shizuoka University of Art and Culture*.

Target peneliti adalah mahasiswa dengan usia 20-24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tinggi di SUAC. Jumlah sampel untuk menjadikan suatu penelitian valid adalah 30 orang narasumber.

Sumber data penelitian ini salah satunya adalah menggunakan hasil survei nasional Departemen Pemilihan Dalam Negeri dan Komunikasi atau *Soumushou Senkyoubu* (総務省選挙部) tahun 2001, 2010, dan 2013. Dari hasil survei Departemen Pemilihan Dalam Negeri dan Komunikasi tersebut masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu pada periode ke-19 (tahun 2001), ke-22

(tahun 2010), dan ke-23 (tahun 2013) dibagi menjadi 13 klas dengan interval usia yakni:

Klas	Klas Interval (Usia)
1	20-24
2	25-29
3	30-34
4	35-39
5	40-44
6	45-49
7	50-54
8	55-59
9	60-64
10	65-69
11	70-74
12	75-79
13	>80

Tabel 1.1 klas Interval Usia Pemilih yang Mengikuti Pemilu (sumber: Dai 22-kai sangiingiintsuujuosenkyo ni okeru nenrei betsu touhyou joukyou dan ai 23-kai sangiingiintsūjōsenkyo ni okeru nenrei betsu touhyou joukyou tahun 2013)

Dapat dilihat dalam tabel 1.1. bahwa interval dengan usia termuda adalah 20 hingga 24 tahun sehingga interval usia termuda yakni 20 hingga 24 tahun akan menjadi kriteria yang ditargetkan oleh peneliti, guna mencari data yang lebih rinci.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah minat mahasiswa SUAC Jepang terhadap pemilu Jepang?

2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi minat mahasiswa SUAC Jepang terhadap keikutsertaan mereka dalam pemilu?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan minat mahasiswa Jepang terhadap pemilu melalui studi mahasiswa SUAC, kemudian mencari tahu faktor-faktor yang memengaruhi minat mahasiswa Jepang terhadap keikutsertaan mereka dalam pemilu.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui minat mahasiswa Jepang terhadap pemilu. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber bagi penelitian dikemudian hari yang memiliki relevansi dengan skripsi ini.

1.6 Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai pemilu dan politik di Jepang saat ini sangatlah banyak, beberapa diantaranya adalah penelitian Maeda dan Gill Steel. Maeda yang merupakan ahli ekonomi senior di *Japan Center for Economic Research* (JCER) dalam artikel berjudul *Election System Dilutes Voice of Young Voter* yang diterbitkan JCER pada tahun 2011 menjelaskan beberapa faktor umum menurunnya suara pemuda Jepang (www.jcer.or.jp/eng/research/pdf/maeda20110530e.pdf, diakses tanggal 13 November 2014, pukul 15.21 WIB).

Faktor-faktor tersebut adalah:

1. terjadinya fenomena *koureika shakai* (高齢化社会) atau yang dalam kamus berarti masyarakat yang menua. Jumlah penduduk yang berusia tua lebih banyak dari pada usia muda sehingga suara dalam pemilu didominasi oleh orang tua;
2. usia minimal pemilih yang terlalu tinggi dibanding dengan usia minimal pemilih di negara-negara lain. Usia pemilih di Eropa rata-rata berkisar pada usia 18 tahun, sedangkan di Jepang adalah 20 tahun;
3. hanya sedikit pemuda yang mau menyuarakan ketidakseimbangan pembagian porsi dalam kebijakan nasional. Porsi dalam pengambilan kebijakan lebih sedikit dari pemilih yang lebih tua, sehingga pemuda hanya memiliki sedikit andil dalam pembuatan kebijakan di Jepang. Kemudian terdapat pula anggapan yang berkembang dalam masyarakat Jepang bahwa sebuah kebijakan tidak perlu merefleksikan pendapat orang-orang tidak menggunakan suara; dan
4. ketidakseimbangan pemilih dimana setiap prefektur memiliki jumlah pemilih yang beda jauh sehingga menimbulkan perbedaan yang signifikan. Bisa jadi di suatu wilayah jumlah pemuda lebih sedikit dibanding orang tua sehingga jumlah pemuda yang memilih terlihat sedikit.

Menurut peneliti faktor-faktor menurunnya jumlah pemilih muda yang dikemukakan oleh Maeda tersebut sudah cukup jelas. Persamaan penelitian Maeda dan skripsi ini adalah menjelaskan faktor dibalik sedikitnya jumlah pemuda Jepang dalam menggunakan hak suaranya. Namun faktor-faktor di atas merupakan faktor-faktor secara umum, belum spesifik merujuk pada mahasiswa

dan kurang menggambarkan minat mahasiswa terhadap pemilu Jepang sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Gill Steel adalah anggota peneliti di *Center of Excellence Project, the Invention of Policy System in Advanced Countries* dan merupakan lulusan dari Universitas Tokyo jurusan Hukum dan Politik. Dalam jurnalnya yang diterbitkan oleh *Social Science Japan Journal* tahun 2004 dengan judul *Gender and Political Behaviour in Japan* membahas mengenai gender dan perilaku politik Jepang (http://www.hawaii.edu/hivandaids/Gender_and_Political_Behaviour_in_Japan/pdf/, diakses tanggal 15 November 2014, pukul 09.42 WIB). Dalam penelitiannya, Steel melakukan perbandingan penggunaan hak suara antara pria dan wanita terhadap dunia politik yang juga merepresentasikan minat politik orang Jepang. Persamaan penelitian Steel dengan penelitian ini adalah dalam jurnalnya Steel berusaha mencari faktor pendorong seseorang menggunakan hak suaranya. Namun dalam penelitian ini variabel usia serta latar belakang pendidikan narasumbernya tidak dibatasi. Sehingga tidak bisa merepresentasikan mahasiswa yang menggunakan hak suaranya.

Di Indonesia sendiri penelitian mengenai pemilu dan politik cukup banyak salah satunya adalah penelitian dengan judul *Partisipasi Politik Wanita Jepang Kontemporer* oleh mahasiswa Universitas Indonesia bernama Hasnah Pujiastuti (<http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-20157889.pdf>, diakses tanggal 27 Juli 2015, pukul 17.06 WIB). Dalam penelitian tersebut, secara garis besar Hasnah meneliti kegiatan politik wanita Jepang setelah sekutu masuk dan mengubah berbagai sistem di Jepang.

Selain itu juga terdapat skripsi Etty Ermawati (2009), mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul Pergantian Kepemimpinan Jepang Pasca Pemilu 2007 (<http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t12441.pdf>), diakses tanggal 29 Juli 2015, pukul 09.36 WIB). Dalam skripsinya tersebut Ermawati membahas mengenai gambaran pemilu Majelis Tinggi tahun 2007 dimana salah satu partai yang selama ini menjadi partai terkuat serta diunggulkan justru kalah dalam pemilu tersebut.

Penelitian mengenai pemilu dan politik di Jepang yang telah banyak diteliti adalah mengenai faktor umum jumlah pemilih muda yang turun, tingkat partisipasi, dan masalah mengenai gender dalam dunia politik. Sejauh ini belum ada penelitian yang secara spesifik mengambil tema dan objek mengenai minat mahasiswa Jepang terhadap pemilu di Jepang, sehingga peneliti tertarik meneliti hal tersebut.

1.7 Landasan Teori dan Konsep

Skripsi ini menggunakan teori dan konsep yang ada dalam ilmu politik dan pemerintahan. Menurut Miriam Budiarjo:

“Teori politik adalah bahasan dan renungan atas a) tujuan dari kegiatan politik, b) cara-cara mencapai tujuan itu, c) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu dan d) kewajiban-kawajiban (*obligations*) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu.” (Budiarjo, 2008: 43)

Budiarjo berpendapat bahwa teori politik menjadikan moral sebagai dasar. Segala fenomena mengenai politik berfungsi untuk mengatur interaksi antar

anggota masyarakat sehingga menciptakan kehidupan berpolitik yang stabil dan sehat. Untuk itu partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting.

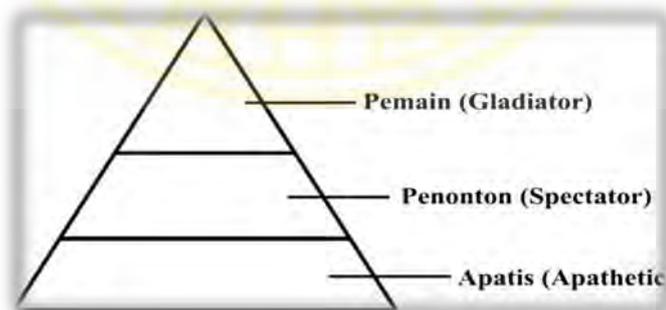
Menurut McClosky dalam Budiarto (2008: 367):

“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum”

Menurut Huntington dan Nelson dalam Budiarto (2008:368) “Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.”

Menurut Budiarto di negara-negara demokrasi, partisipasi tinggi masyarakat merupakan pertanda yang baik sedangkan partisipasi rendah dianggap tanda yang tidak baik, karena hal tersebut dapat diartikan bahwa masyarakatnya kurang peduli dengan kondisi politik dan pemerintahan negaranya.

Milbrath dan Goel membuat piramida partisipasi politik, seperti pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 Piramida Pola Partisipasi Politik (sumber: Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm 372

Pemain (*gladiators*) adalah yaitu orang-orang yang sangat aktif dalam dunia politik. Jumlah gladiator sekitar 5-7% dari populasi penduduk. Pemain (*spectator*) adalah orang-orang yang minimal telah memakai hak pilihnya dan jumlahnya berkisar 60 persen dari populasi. Apatitis (*apathetic*) adalah orang-orang yang sama sekali tidak aktif termasuk tidak menggunakan hak pilihnya dan jumlahnya berkisar 33 persen dari populasi.

Terdapat beberapa bentuk pemerintahan negara-negara di dunia yang oleh Prof. Padmo Wahyono, SH dalam Budiyanto (2007:54) membaginya menjadi 2 jenis yakni bentuk pemerintahan klasik dan bentuk pemerintahan modern. Bentuk pemerintahan klasik adalah aristokrasi dan demokrasi, sedangkan bentuk pemerintahan modern adalah republik dan monarki.

Bentuk pemerintahan aristokrasi menurut Aristoteles dalam Budiyanto adalah "...bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan demi kepentingan umum." (ibid). Aristoteles menganggap bentuk pemerintahan semacam ini sangatlah baik dan ideal. Bentuk pemerintahan demokrasi menurut Plato dalam Budiyanto "...yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelata." (ibid).

Negara dengan bentuk pemerintahan republik dipimpin oleh presiden. Dalam Budiyanto (2007:57) pemerintahan republik dibagi menjadi 3, yakni:

1. republik absolut dimana pemerintahannya bersifat diktator sehingga penguasa bebas mengabaikan konstitusi. Negara memiliki parlemen namun tidak berfungsi;

2. republik parlementer dimana presiden hanya menjadi kepala negara sedang kepala pemerintahan merupakan tanggung jawab Perdana Menteri; dan
3. republik konstituonal dimana presiden menjadi kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, namun dibatasi konstitusi dan diawasi secara ketat oleh parlemen.

Negara dengan bentuk pemerintahan monarki menurut Tanenhaus (int, 2011:668), "*a monarchy is a form or government that is headed by a king or queen...*" artinya adalah sistem pemerintahan monarki menjadikan raja tau ratu sebagai kepala negara. Bentuk pemerintahan monarki dalam Budiyanto juga dibagi menjadi 3, yakni:

1. monarki absolut dimana negara dikepalai raja, ratu, syah, atau kaisar dengan wewenang tidak terbatas sehingga titah raja adalah merupakan undang-undang yang harus dilaksanakan;
2. monarki parlementer dimana negara dikepalai raja, ratu, syah, atau kaisar tetapi kekuasaan tertinggi ada pada parlemen atau DPR. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri yang harus bertanggung jawab pada parlemen;
3. monarki konstituonal dimana negara dikepalai raja, ratu, syah, atau kaisar namun kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang yang berlaku. Undang-undang itu sendiri dibuat dan disahkan oleh parlemen (DPR).

Negara Jepang sendiri menganut bentuk pemerintahan monarki konstitusional, sehingga Jepang menjadikan kaisar sebagai kepala negara namun kepala pemerintahan diserahkan kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri sendiri dipilih oleh parlemen dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.

Mengenai sistem pemilu, Jepang menganut sistem pemilu sistem distrik. Di dunia secara umum terdapat 2 sistem pemilu yakni sistem distrik dan sistem proporsional. Sistem distrik didasarkan atas wilayah dimana di satu wilayah dibagi menjadi distrik-distrik kemudian masing-masing distrik berhak atas satu kursi. Budiarmo (2008:462) menjelaskan bahwa dalam sistem distrik kontestan pemilu dengan suara terbanyak berhak menjadi pemenang tunggal meskipun jumlah selisih dengan kontestan lain tipis. Suara pada distrik itu tidak dapat membantu meningkatkan jumlah suara pada distrik lain, sedangkan dalam sistem proporsional satu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan. Apabila wilayah tersebut dibagi distrik yang lebih kecil dan terdapat banyak kontestan pemilu, seluruh kontestan dapat memenangkan pemilu tanpa melihat asal distrik kontestan tersebut. Sehingga memungkinkan ada lebih dari kontestan yang berasal dari distrik yang sama.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah metode kuantitatif. Menurut Raco perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif terletak pada data yang akan digunakan. "...metode kuantitatif akan menggunakan data survei, testing, eksperimen, atau lewat kuesioner." (Raco, 2010:67).

Malhotra dalam Anshori dan Sri Iswati (2009: 13), “*Quantitative research is a research methodology which seeks to quantify the data, and typically, applies some form of statistical analysis*,”. “Penelitian kuantitatif adalah metodologi penelitian yang berusaha mengukur data dan umumnya mengaplikasikan sebagian bentuk dari analisis statistik.”

Penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif yakni dengan data yang didapatkan berupa angket dan kuesioner. Alasan peneliti menggunakan metode kuantitatif adalah data-data penelitian banyak bersumber hasil survei yang umumnya berupa angka, tabel, dan grafik sehingga lebih tepat jika menggunakan metode kuantitatif dalam mengumpulkan data lainnya.

1.8.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data angket dan kuesioner yang akan diberikan kepada mahasiswa Jepang yang tengah menempuh pendidikan tinggi di SUAC. Untuk data sekunder peneliti akan menggunakan hasil-hasil survei, buku, jurnal, dan data dari internet.

Penyebaran angket dan kuesioner tidak dapat dilakukan secara random, karenanya peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. „*Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu*“ (Anshori dan Sri Iswati, 2009:105). “*In purposive sampling, the researcher select sampling units based on his or her judgement of what units will facilitate an investigation.*” (Adler and Clark, 2008: 121). Artinya adalah dalam *purposive sampling*, peneliti membatasi sampel dengan memberikan kriteria-kriteria yang

harus dipenuhi. Dalam penelitian ini, peneliti memberi kriteria pada sampel yakni sampel haruslah seorang mahasiswa Jepang dengan rentang usia antara 20-24 tahun serta masih menjadi mahasiswa aktif di SUAC. Sampel diluar kriteria di atas, dianggap tidak relevan terhadap penelitian.

Peneliti akan meminta bantuan salah seorang teman peneliti yang berada di SUAC Jepang untuk menyebarkan angket. Pertama peneliti akan membuat angket dalam bahasa Jepang kemudian mengirim *file* angket menggunakan *email* atau kotak surat elektronik. Setelah *file* angket terkirim dan diterima oleh teman peneliti, angket akan dicetak dan dibagikan kepada narasumber dengan kriteria seperti di atas untuk diisi. Kemudian setelah data didapat, teman peneliti akan men-*scan* kertas angket dan mengirim data melalui email. Setelah data diterima, peneliti dapat mengolah data tersebut

1.8.2 Metode Analisis Data

Data yang masuk berupa angket, kuesioner, hasil survei, buku, jurnal, dan data internet akan dipilah kembali, kemudian dilakukan analisis data. Penelitian ini menggunakan data angket sebagai sumber utama penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam angket merupakan pertanyaan yang bersifat tertutup yakni dengan mencantumkan pilihan jawaban yang akan pilih oleh narasumber.

Peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu data berupa angket yang telah didapat kemudian setelah itu peneliti akan menganalisis hasil data angket dan kuesioner di tiap-tiap nomor. Data tersebut rangkuman masing-masing nomor

kemudian dibuat ke dalam grafik, diinterpretasikan untuk ditemukan bagaimana minat mahasiswa Jepang terhadap pemilu dan faktor-faktor yang memengaruhi pandangan mereka terhadap pemilu.

1.9 Sistematika Penulisan Skripsi

- Bab I, terdiri dari Latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, dan metode penelitian.
- Bab II, merupakan penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan politik seperti kultur politik, sistem pemilu, hierarki pemerintah, dan potensi pemilih muda di Jepang, serta profil dari SUAC
- Bab III, berisi penyajian data disertai analisis data.
- Bab IV, berisi kesimpulan dari analisis pembahasan yang telah dilakukan. Kesimpulan penelitian ini disusun berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya.